



CONTINUOUS IMPROVMENT REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN



SISTEMATIKA

- 01** FRAMEWORK RENCANA AKSI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
- 02** CONTINUOUS IMPROVEMENT IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN





01

FRAMEWORK RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT



Perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) yang di tunjukan dengan berintegritas, berkinerja tinggi, dan melayani secara prima.

2020

INDEX RB DINKES
TAHUN 2020 :
21,85



2021

INDEX RB DINKES
PERINGKAT 29
43,25 (C) dan Nilai
BUDAYA KERJA 68,46



GOAL

PROBLEM

- Masih rendahnya komitmen dalam implementasi reformasi Birokrasi;
- Manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- Penataan kelembagaan yang masih belum efektif;
- Peranan tata kelola yang belum sepenuhnya diterapkan, masih terkotak-kotak antar bidang/ bagian.
- Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik;
- Menerapkan budaya kerja "Komitmen" belum menjadi kebiasaan dalam bekerja;
- Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal
- Lemahnya Sistem Manajemen Pengawasan
- Pekerjaan Rutinitas, kurang koordinasi
- Kurangnya Inovasi dalam menjalankan pekerjaan
- Pekerjaan masih banyak yang dilakukan secara manual.
- Pelaksanaan SOP dan alur belum sepenuhnya di jalankan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

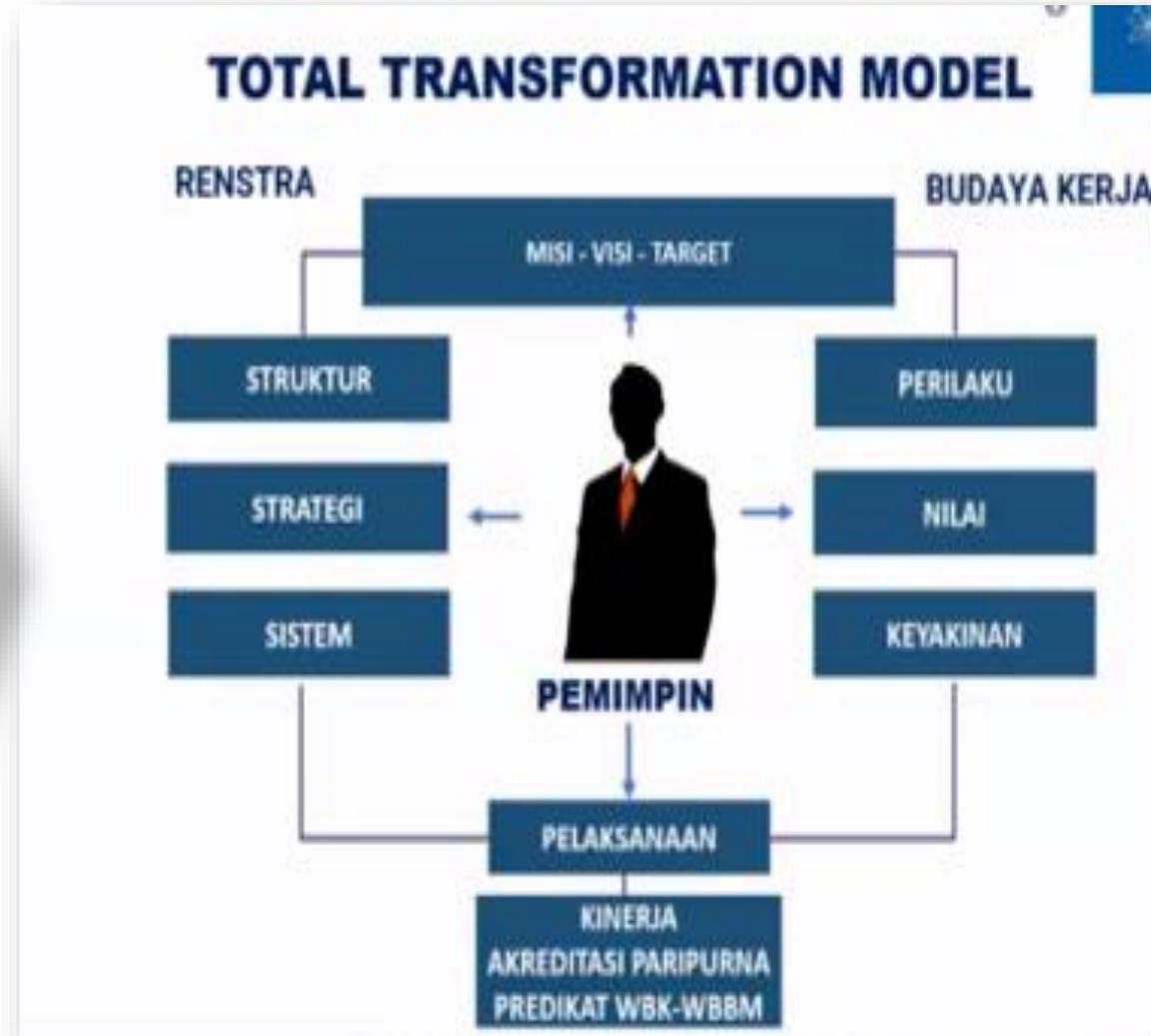
- Berorientasi Pelayanan**
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
 - Bersah, okekan, solutif, dan dapat diandalkan
 - Melakukan perbaikan tiada henti
- Akuntabel**
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
- Kompeten**
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
 - Membantu orang lain belajar
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
- Harmonis**
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
 - Suka menolong orang lain
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- Kolaboratif**
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
 - Tertulis dalam bekerja sama untuk meningkatkan nilai tambah
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
- Adaptif**
 - Capat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
 - Tertus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
 - Berinovasi proaktif
- Loyal**
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
 - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan Instansi, dan Negara
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara

2022

CAPAIAN SEMENTARA
HASIL SELF ASSESSMENT
89,58 (A)



KOMITMEN PARA PIMPINAN





01

MANAJEMEN PERUBAHAN

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES → MANAJEMEN PERUBAHAN

<p>TARGET</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melakukan RB; b) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Internal Perangkat Daerah; c) Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi thd perubahan.
<p>RENCANA AKSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 2. Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 3. Membentuk Agen Perubahan (<i>Agent of Change</i>) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 4. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 5. Menyusun Dokumen Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 6. Menetapkan mekanisme dan menyiapkan media untuk mensosialisasikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala; 8. Menjadikan Pimpinan menjadi role model dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 9. Menciptakan perubahan budaya kerja dan pola pikir dalam organisasi. → Sosialisasi RB Setiap Apel
<p>WAKTU PENYELESAIAN</p>	<p>21- 28 FEBRUARI 2022</p>
<p>PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL</p>	<p>1-4 MARET 2022</p>



02

PENATAAN PERUNDANG - UNDANGAN

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES → PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TARGET	<ul style="list-style-type: none"> a) Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perUU yang dikeluarkan oleh Pemerintah; b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perUU
RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait Penyelenggaraan Kesehatan, terkait BLUD dan standar pelayanan lainnya 2. Pengkajian prosedur pembentukan Perda dan Pergub
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022

03

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI

TARGET	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan; b) Meningkatnya kinerja dalam pencapaian target
RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penataan Kelembagaan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat 2. Penyusunan SOTK yang sesuai dengan kewenangan 3. Evaluasi ABK, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan 4. Penataan kelembagaan UPT
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022



04

PENATAAN PERUNDANG - UNDANGAN

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES → PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN	
TARGET	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan SDM b) Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan SDM c) Meningkatnya Disiplin SDM d) Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur Pada Masing2 PD
RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan perencanaan kebutuhan Pegawai 2. Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai 3. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi 4. Pelaksanaan sistem promosi dan mutasi pegawai secara terbuka (<i>open bidding</i>) 5. Penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi 6. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme jabatan fungsional 7. Penerapan kebijakan sanksi, reward dan punishment berbasis kinerja 8. Evaluasi kebijakan sanksi, reward dan punishment berbasis kinerja
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022

05

PENATAAN PERUNDANG - UNDANGAN

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES → PENATAAN KETATALAKSANAAN	
TARGET	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Perangkat Daerah; 2. meningkatnya kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan peta proses bisnis seluruh PD 2. Penerapan e-government yang terintegrasi 3. Penerapan e planning dan e-budgeting dalam perencanaan dan penganggaran
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022

06

PENATAAN PENGAWASAN

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES → Penguatan Pengawasan			
TARGET	a) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan ; b) Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Keuangan ; c) Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan Wewenang Pada Masing2 Perangkat Daerah		
RENCANA AKSI	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 1. Penguatan peran APIP di lingkungan Pemda Jawa Barat 2. Pembekalan APIP di Pemda Prov. Jawa Barat 3. Pelaksanaan audit berbasis resiko 4. Penyelesaian TLHP Eksternal dan Internal 5. Peningkatan penerapan SPIP 6. Monitoring dan evaluasi penerapan SPIP </td> <td style="vertical-align: top;"> 7. Pembangunan ZI (WBK/WBBM) di RSUD milik Provinsi Jabar 8. Launcing WBS dan Pelaksanaan WBS 9. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi 10. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan 11. Tindak lanjut evaluasi BPK RI </td> </tr> </table>	1. Penguatan peran APIP di lingkungan Pemda Jawa Barat 2. Pembekalan APIP di Pemda Prov. Jawa Barat 3. Pelaksanaan audit berbasis resiko 4. Penyelesaian TLHP Eksternal dan Internal 5. Peningkatan penerapan SPIP 6. Monitoring dan evaluasi penerapan SPIP	7. Pembangunan ZI (WBK/WBBM) di RSUD milik Provinsi Jabar 8. Launcing WBS dan Pelaksanaan WBS 9. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi 10. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan 11. Tindak lanjut evaluasi BPK RI
1. Penguatan peran APIP di lingkungan Pemda Jawa Barat 2. Pembekalan APIP di Pemda Prov. Jawa Barat 3. Pelaksanaan audit berbasis resiko 4. Penyelesaian TLHP Eksternal dan Internal 5. Peningkatan penerapan SPIP 6. Monitoring dan evaluasi penerapan SPIP	7. Pembangunan ZI (WBK/WBBM) di RSUD milik Provinsi Jabar 8. Launcing WBS dan Pelaksanaan WBS 9. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi 10. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan 11. Tindak lanjut evaluasi BPK RI		
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022		
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022		

07

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES → Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
TARGET	meningkatnya AKIP.
RENCANA AKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan SAKIP Dinkes 2. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala (Bulanan) 3. Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja 4. Pembangunan sistem perencanaan untuk kesesuaian IKU dengan Program/kegiatan 5. Pelaksanaan sistem perencanaan untuk kesesuaian IKU dengan Program/kegiatan 6. SKP Pegawai sebagai penilaian kinerja individu
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022



08

PENATAAN PERUNDANG - UNDANGAN

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES → PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

<p>TARGET</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Lebih Cepat, Lebih Murah, Lebih Aman, Dan Lebih Mudah Dijangkau) Pada Instansi Pemerintah; 2. Meningkatnya Jumlah Jenis Pelayanan Di Fasyankes (UPTD) 3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinkes Dan UPTD.
<p>RENCANA AKSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan unit-unit pelayanan publik (RSUD dan Balai) 2. Penerapan dan pengembangan pelayanan publik berbasis IT 3. Reviu pelaksanaan SOP 4. Pembinaan pola pikir petugas yanlik 5. pengaduan masyarakat berbasis sistem informasi yang <i>real-time</i> 6. Publikasi Dokumen Informasi Publik (DIP) melalui website dan media sosial
<p>WAKTU PENYELESAIAN</p>	<p>21- 28 FEBRUARI 2022</p>
<p>PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL</p>	<p>1-4 MARET 2022</p>



QUICK WINS

Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan **Program percepatan** dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh Dinkes Jabar dan UPTD

FOKUS PADA HASIL REFORM

Quick Win Mandatory

- Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi *Quick Win* Instansi pemerintah;
- *Quick Win* lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN

Quick Win Mandiri

- Dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi pemerintah

MONITORING



1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Reformasi Birokrasi Dinkes dan UPTD untuk memantau perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam *Rencana Aksi* Reformasi Birokrasi Dinkes Jabar
2. Pertemuan rutin Tim Assesor Internal untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada Dinkes dan UPTD agar konsisten dengan dalam *Rencana Aksi* Reformasi Birokrasi Dinkes Jabar dan memberikan laporan kepada ketua tim RB hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
3. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pokja Pelaksana Reformasi Birokrasi untuk:
 - Membahas Kemajuan, Hambatan Yang Dihadapi, Dan Penyesuaian Yang Perlu Dilakukan Untuk Merespon Permasalahan Atau Perkembangan Lingkungan Strategis;
 - Pengukuran Target-target Kegiatan Reformasi Birokrasi Sebagaimana Diuraikan Dalam *Road Map* Dengan Realisasinya;
 - Survei Terhadap Kepuasan Masyarakat Dan Persepsi Anti Korupsi;
 - Pertemuan Dalam Rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Yang Dikoordinasikan Oleh Biro Organisasi Yang Kemudian Hasilnya Dilaporkan Ke Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

EVALUASI



- Evaluasi triwulan , semesteran atau, tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh Ketua Tim RB untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun kedepan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- Evaluasi tahunan di setiap bidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinkes Provinsi Jawa Barat;
- Evaluasi tahunan di tingkat Provinsi , yang dipimpin langsung oleh Biro Organisasi



02

**CONTINUOUS
IMPROVEMENT
IMPLEMENTASI
REFORMASI
BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**





CAPAIAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI (DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT)

(IMPLEMENTASI RB TIDAK HANYA SEBATAS PEMENUHAN DOKUMEN, TETAPI TELAH BERKONTRIBUSI LANGSUNG TERHADAP CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH)

INDEKS RB
PERANGKAT
DAERAH

A

89,24



DARI 8 UPTD DINKES
2 UPTD MERAH WBK
1 PROSES WBK
1 PROSES WBBM

4 INDIKATOR UTAMA
YANG TERCAPAI
PADA TAHUN 2022
4 INDIKATOR

ANGKA HARAPAN
HIDUP MASYARAKAT
JABAR
73,23

HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI RB 2022
(NILAI SELF ASSESSMENT)

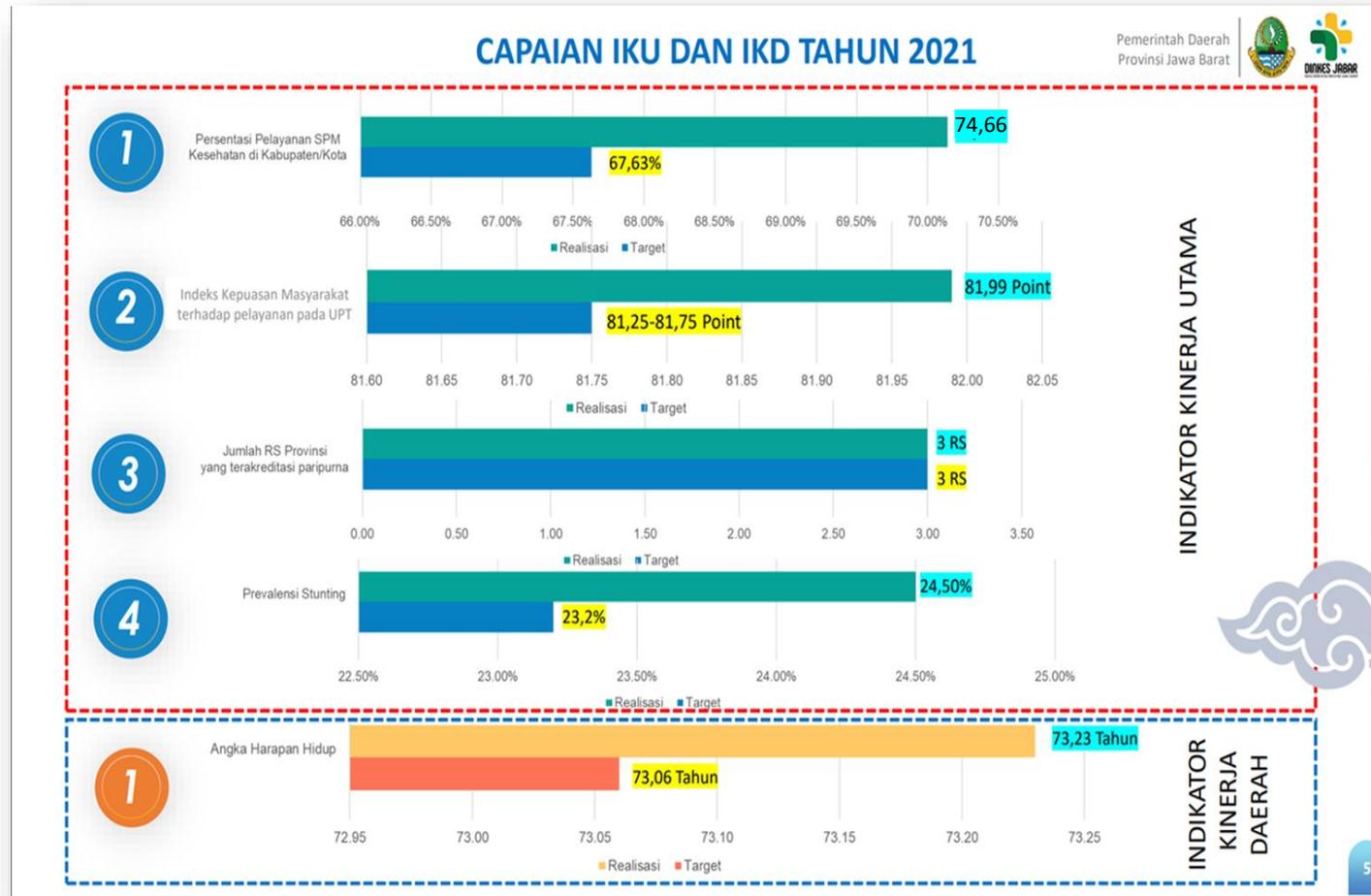
HASIL EVALUASI
ZONA INTEGRITAS 2021 -
2022 (KEMENPAN RB/TPI)

IKU PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

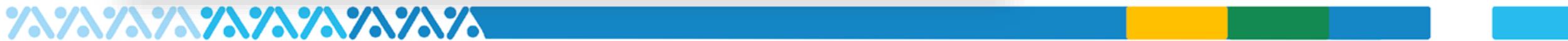
IKU GUBERNUR JAWA
BARAT TAHUN 2022



PROGRES CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 2018-2021



**CAPAIAN IKU
PERANGKAT
DAERAH**



KOMITMEN PERUBAHAN

01

KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI ROLE MODEL & AKSELERATOR RB



Ruang Kerja Rb



Role model rb



Apel Pagi



Evaluasi Kinerja



Internalisasi Berakhlak



Leader Kompetensi



Peningkatan Inovasi



Pembangunan ZI

02

INOVASI AGEN PERUBAHAN

Dashboard showing COVID-19 statistics for West Java:

- Keterangan Tempat Tidur (BOR)**: Update Terakhir: Kamis, 04 Agustus 2022 pukul 11.00
- Sumber Data**: Data yang digunakan adalah Data RS Online (Kemenkes) yang disesuaikan dengan kategori yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat. Pengkinian data dilakukan secara harian (tidak realtime).
- TOTAL BOR**: 8,53% (646 dari 7.576 Tempat Tidur Terisi)
- TOTAL RS**: 393 (Total RS menangani COVID-19 di Jawa Barat)
- RS MELAYANI COVID-19**: 340 (86,51% dari Total RS)

News article: **Pasien Omicron Boleh Isoman, Tapi Harus Tahu Hal ini!**

Sub-headline: **Akses Layanan Kesehatan Bagi Pasien Isolasi Mandiri**

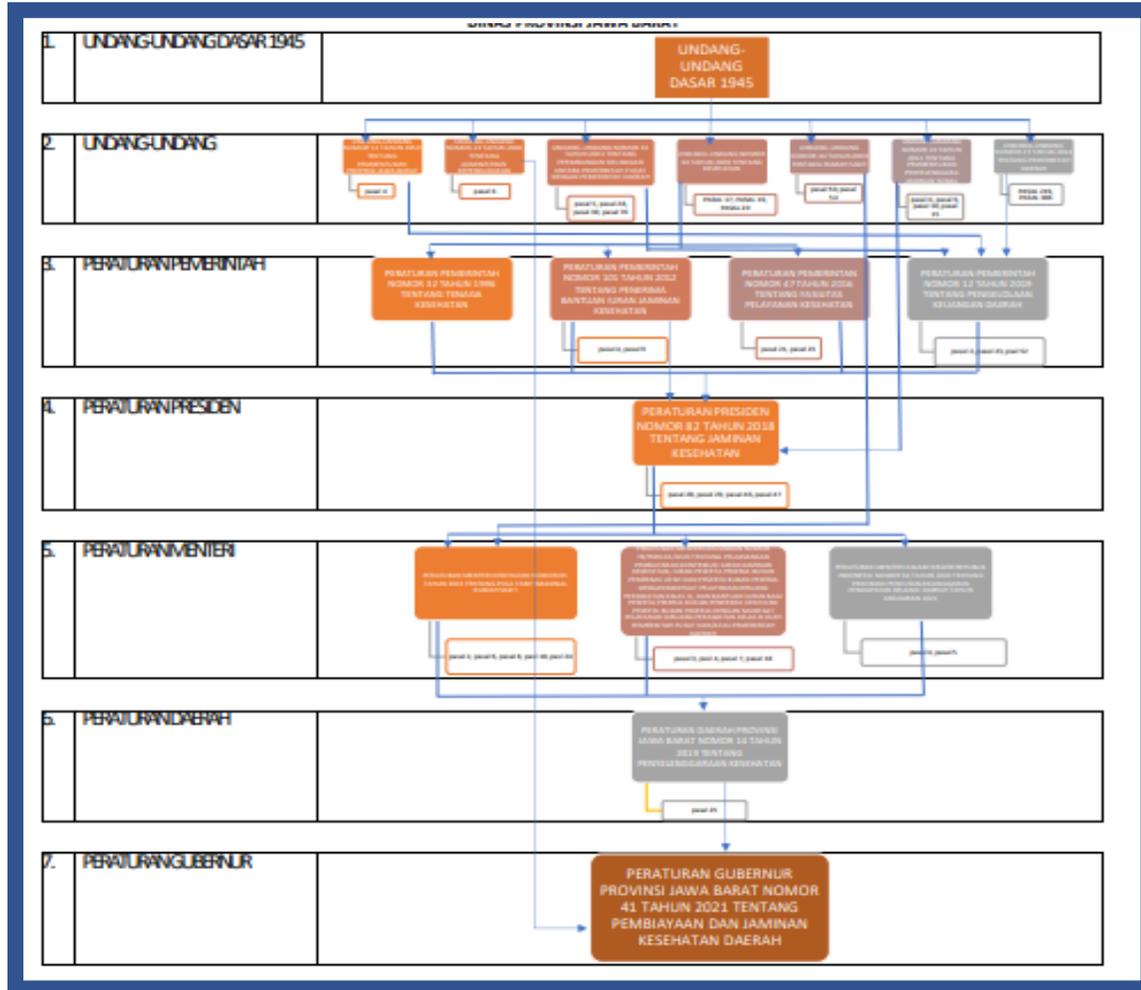


PENYEDERHANAAN REGULASI



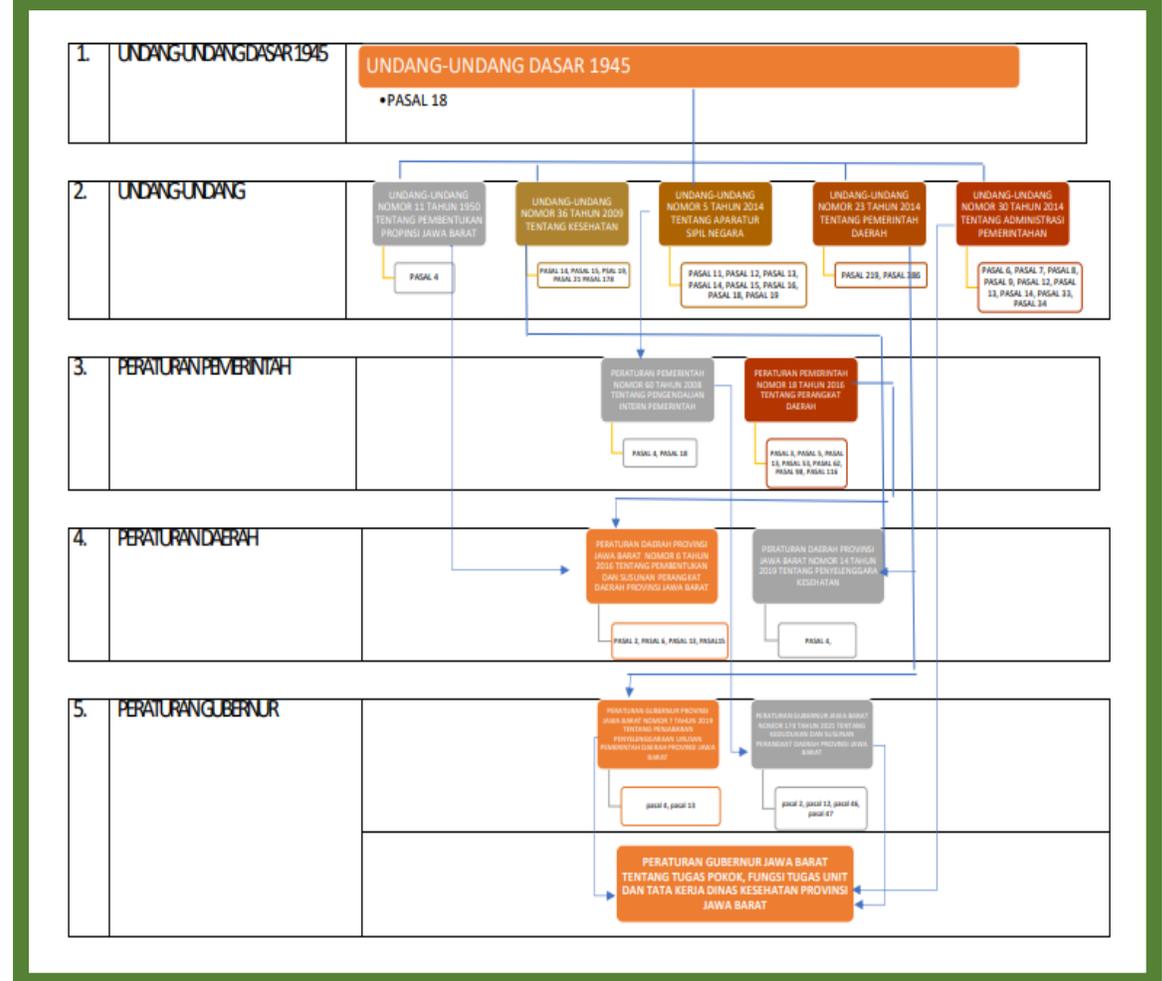
01

PETA KETERKAITAN ANTAR KEBIJAKAN



02

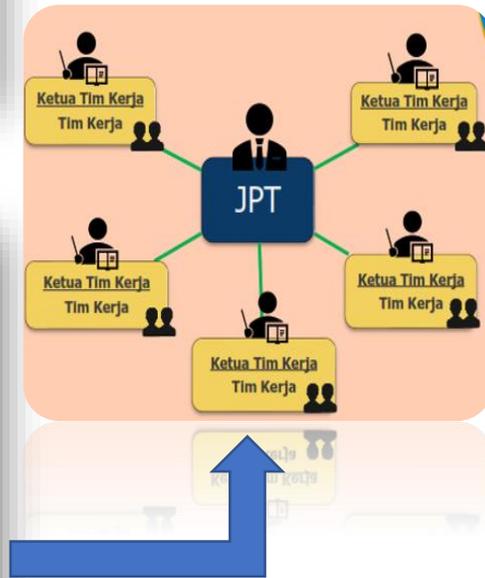
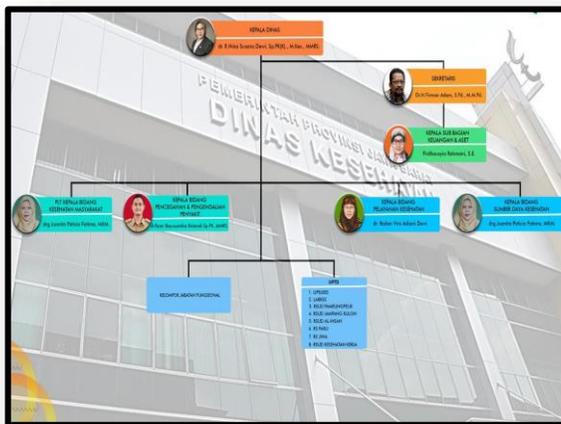
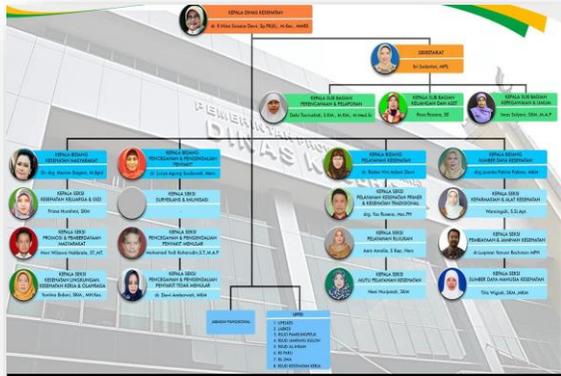
PENYEDERHANAAN REGULASI PELAYANAN



PENATAAN ORGANISASI PASCA PB

01

PENETAPAN TIM KERJA



02

CAPAIAN KINERJA TIM

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021



Faktor Pendorong

Banyak faktor yang mempengaruhi AHH ini, termasuk faktor sosial dan ekonomi, untuk Tahun 2021 ekonomi Jawa Barat mengalami pertumbuhan sebesar 3,74 persen. Jumlah Kematian bayi menurun dengan rasio 3.34/1000 KH, jumlah penduduk yang sakit penduduk yang mengeluh sakit mengalami penurunan dari 47,61 % menjadi 43,41%.

Dipengaruhi oleh pencapaian indikator SPM Kabupaten/Kota dan penguatan pembinaan dan fasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Indeks Kumulatif dari IKM UPTD Visi dan Misi UPTD untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat melalui perbaikan manajemen Pelayanan Rumah Sakit, Pemenuhan Sarana dan Prasarana, SKTM untuk Masyarakat terutama UPTD RS di Jawa Barat

Target meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RS Provinsi yang berdaya saing 3 RS : RS Paru, RS Al-Ihsan dan RS. Jiwa

Untuk Prevalensi Stunting dipengaruhi oleh Sisi Kesehatan dan Non Kesehatan, 30% intervensi spesifik dan 70% intervensi sensitif. Intervensi Kelahiran Ibu Hamil, Gizi dan menjadi PR Intervensi Sensitif yang harus dikordinasikan dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat Target Amanat RPJMN 14% RPJMD 19,2%

DIGITAL GOVERNMENT

01

PENERAPAN SPBE ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



SIAP JABAR
SISTEM INFORMASI APARATUR JAWA BARAT



TRK



SIASN
BIDIN KEPEGAWAIAN NEGARA

einkpn
Transparan Itu Mudah

KPK
miti Pemberantasan Korupsi
LHKASN
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

SIDEBAR
Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jawa Barat

WA BLAST

HAIMOB
Dinas Kesehatan

02

PENERAPAN SPBE LAYANAN PUBLIK



KETERSEDIAAN TT PADA PIKOBAR

KONSULTASI JIWA ONLINE KJOL

INOVASI KOLALIN COVID 19 (Komunikasi Lalu Lintas Covid)

PENDAPTARAN ONLINE

INOVASI BISIK (Bincang Sehat Asyik)

INOVASI KAHONTAL

SNIRUPA

SIJANTAN JUARA
SISTEM JAMINAN KESEHATAN JABAR JUARA

IMPLEMENTASI SUSTERA TERHADAP SARANA PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK

INOVASI KOLALIN COVID 19 (Komunikasi Lalu Lintas Covid)

No	Nama Pasien	Tgl. Masuk	Tgl. Keluar	Status	Alamat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



1.



INOVASI ARISAN MOBIL (APLIKASI RSUD AL IHSAN MOBILE)



2.

“SI CAKAR SAKTI” SISTEM CETAK KARTU KELUARGA & AKTE KELAHIRAN DI RS



3.

TELAH DI REPLIKASI DINKES KOTA / KABUPATEN PROVINSI JAWA BARAT



INOVASI APLIKASI E RESEP



7.

INOVASI KAHONTAL



6.

INOVASI BISIK (Bincang Sehat Asyik)



Link: youtube RSUD Al Ihsan



4.

INOVASI IKM



01

PENINGKATAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN

IP ASN (NAMA PERANGKAT DAERAH) 2022

81,62

NILAI PADA APLIKASI SIAP JABAR

KUALIFIKASI

13,15

KOMPETENSI

33,63

KINERJA

29,85

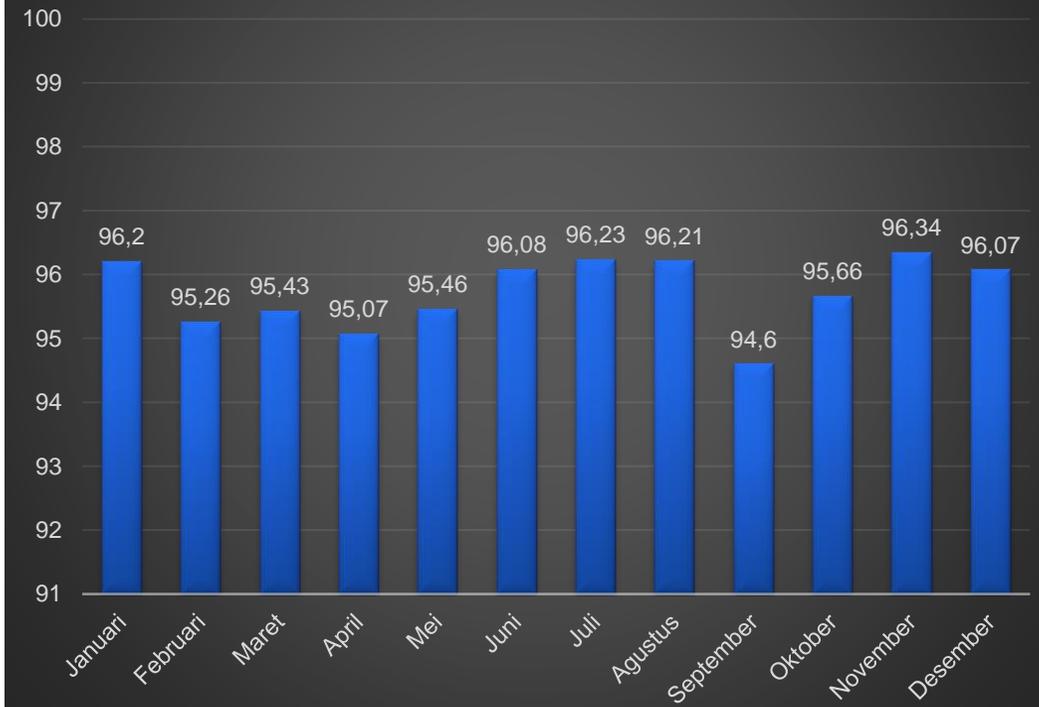
DISIPLIN

4,99

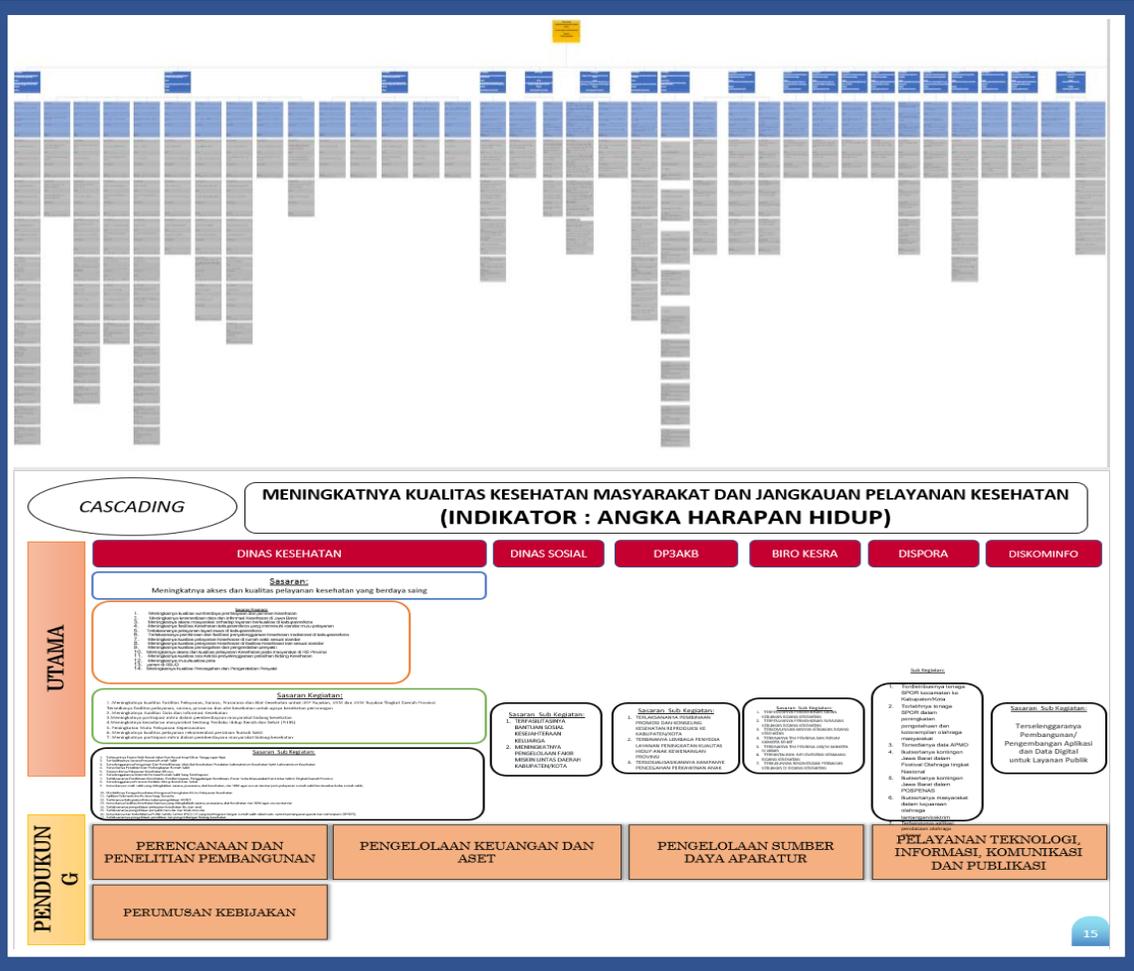
02

PENINGKATAN KINERJA ASN

RATA RATA NILA TRK TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT



01 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH



02 RAPORT KINERJA PERANGKAT DAERAH

RAPORT KINERJA
DINAS KESEHATAN
TRIWULAN III TAHUN 2022

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Jumlah Sasaran Sub Kegiatan	Jumlah yang Tercapai	Jumlah yang tidak Tercapai
82,94%	340	282	58
Efisiensi Anggaran	Jumlah Anggaran	Jumlah yang Terealisasi	Jumlah yang tidak Terealisasi
-%	Rp 297.709.674.485	Rp 126.800.450.942	Rp 170.909.223.543

Penyebab Kegagalan

Jumlah Sasaran Sub Kegiatan tidak Tercapai	Jumlah Penyebab Kegagalan
58	6

Pemenuhan Intervensi Untuk Triwulan IV

Jumlah Langkah Aksi sasaran sub kegiatan yang tidak tercapai (semula)	Jumlah Langkah Aksi (menjadi)	Jumlah Langkah Aksi yang mengalami perubahan jadwal
15	20	-

Penyesuaian Anggaran Untuk Triwulan IV

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan tidak tercapai (semula)	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan (menjadi)	Usulan perubahan anggaran
Rp 121.228.738.455	Rp 143.988.891.015	Rp 22.760.152.560

Selamat!
DINAS KESEHATAN meraih Kinerja: **TERBAIK 25**
DARI 46 PD DAN BIRO

Capaian Kinerja & Anggaran

GRAFIK PROGRESS CAPAIAN KINERJA SASARAN SUB KEGIATAN

KOMITMEN INTEGRITAS

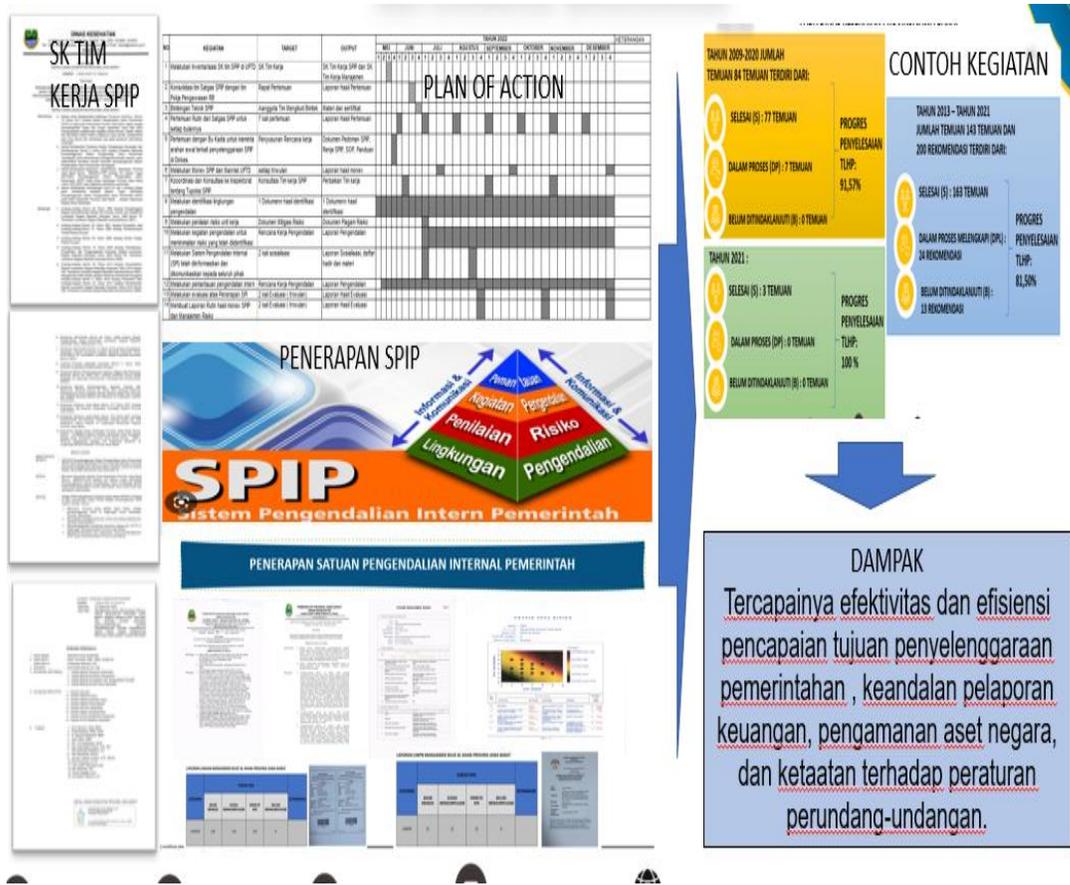
01 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

02 PENERAPAN SPIP/MITIGASI RESIKO



UPTD Labkes Jabar : "Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)" Senin (10/10/2022).

Zona Integritas UPTD RSUD Al Ihsan : dari WBK menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Rabu (12/10/2022).



SK TIM KERJA SPIP

PLAN OF ACTION

PENERAPAN SPIP

PENERAPAN SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

DAMPAK
 Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021

UNIT KERJA YANG DIUSULKAN MERAH PREDIKAT WBK/WBBM TAHUN 2022

Jenis Layanan	Unit Kerja	Kategori
Layanan Kesehatan	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan	WBBM
Layanan Kesehatan	UPTD Laboratorium Kesehatan	WBK
Layanan Pendidikan	SMK Negeri 1 Bandung	WBK
Layanan Pajak Daerah	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Sukarno Hatta	WBK

PLAN OF ACTION

REVISI	TARGET	OUTPUT	NOV	DES	SEP	OCT	NOV	DES
1	Menyusun dan melaksanakan SK dan SOP di UPTD	SK dan SOP						
2	Menyusun dan melaksanakan SOP	SOP						
3	Menyusun dan melaksanakan SOP	SOP						



KOMITMEN PELAYANAN PRIMA



01

PENILAIAN KEPUASAN MASYARAKAT



02

COMPLAIN HANDLING

FRONT OFFICE

FRONT OFFICE

FRONT OFFICE

ALUR PELAYANAN WBS
(Customer Journey System)

1. MELAKUKAN REGISTRASI
2. MELAKUKAN PEMERIKSAAN
3. MELAKUKAN PEMERIKSAAN
4. MELAKUKAN PEMERIKSAAN
5. MELAKUKAN PEMERIKSAAN
6. MELAKUKAN PEMERIKSAAN

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SKM JABAR TERINTEGRASI
QR-QODE SKM Dinas Kesehatan

KETENTUAN
1. MELAMPIRKAN IDENTITAS KTP/SIM
2. MELAMPIRKAN NOMOR HP YG BISA DIUBUNGI

LAYANAN PENGADUAN DAPAT DI LAKUKAN MELALUI:

- KORSAK BERKADUANG/ SURAT
Jl. Srengseng No. 25, Paerik Kelik, Kec. Cibeureum, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40171
- TELEPON/ FAX
(022) 4212 800 / (022) 4230 353
- WHATSAPP CENTER
0850 4130 7950
- FACEBOOK
Dinkes Jabar
- INSTAGRAM
@dinkesjabar
- WEBSITE
https://dinkes.jabarprov.go.id/wbs

Zero Komplain

HALO DINKES
022 4 212 800

JAM PELAYANAN
SENIN-JUMAT
08.00-16.00 WIB

PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

BEFORE

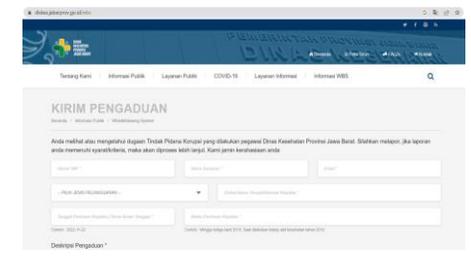


No	Item	Detail	Unit	Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Before 01**
Administrasi internal & eksternal masih manual dan terpisah-pisah, media pelayanan terbatas .
- Before 02**
Ruang pelayanan kurang representative, padif menunggu tamu.
- Before 03**
Media Sosial dan website dimanfaatkan terbatas, hanya menginformasikan layanan lmbaga.
- Before 04**
Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) tidak terintegrasi dan dilakukan manual dengan google form .



CONTINUES IMPROVMENT



- After 01**
Adm internal dan eksternal berbasis IT dan terpadu, media pelayanan tidak terbatas
- After 02**
Ruang pelayanan representative , aktif mendekatkan pelayanan .
- After 03**
Media sosial dan website digunakan untuk layanan informasi, agenda pimpinan dan sumber informasi .
- After 04**
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terintegrasi dengan skm.jabarprov.go.id dengan hasil SKM "sangat baik"



PERBAIKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



HASIL E-MONEV 2021 “TIDAK INFORMATIF”

1. Biro Badan Usaha Milik Daerah & Investasi Sekretariat Jawa Barat	14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jabar	15. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	16. Inspektorat Provinsi Jawa Barat
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jabar	17. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
5. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat
6. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	21. Badan Kepegawalan Daerah Provinsi Jawa Barat
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	23. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	24. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat	25. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
13. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	26. Dinas Kesehatan

- 0%-19,9% mendapat predikat **Tidak Informatif**;

Dinas Kesehatan tidak mengembalikan form evaluasi E-Money KI Jabar pada tahun 2021 sehinga termasuk pada perangkat daerah peridikat “TIDAK INFORMATIF”

HASIL E-MONEV 2022 “INFORMATIF”

No	Nama Perangkat Daerah
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Dinas Pendidikan
4	Dinas Pendapatan Daerah
5	Dinas Kesehatan
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9	Dinas Sosial
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
13	Dinas Sumber Daya Air
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
15	Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
16	Dinas Perkebunan
17	Satuan Polisi Pamong Praja

Perangkat
Daerah yang
“Informatif”

Dinas Kesehatan mengikuti E-Money KI Jabar secara online melalui website <https://e-monevkijabar.com/> dengan meraih predikat Perangkat Daerah “INFORMATIF” ke-5



03

**INOVASI YANG
BERKONTRIBUSI
TERHADAP KINERJA
ORGANISASI DAN
MEMBERIKAN
KEBERMANFAATAN
BAGI MASYARAKAT**

PENGHARGAAN

CAPAIAN PENGHARGAAN TAHUN 2022



49

Penghargaan

5

Internasional

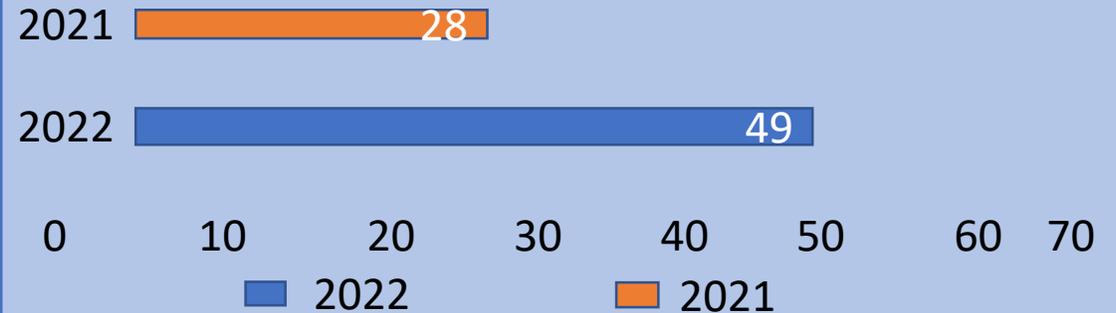
40

Pemerintah/Nasional

4

Non Pemerintah

PRESTASI (PENGHARGAAN) DINAS KESEHATAN TAHUN 2021-2022



6 BESAR IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI (RB) TINGKAT OPD SE-JAWA BARAT

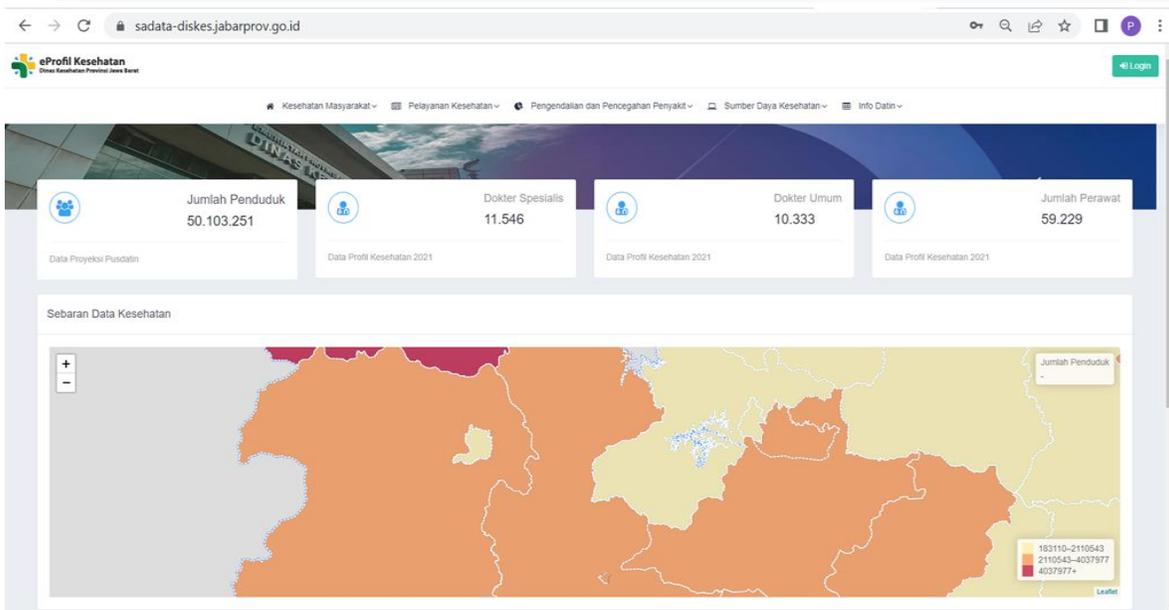


Tim Evaluasi **Pengukuran IRB PD** di Lingkungan Pemdaprov Jabar tahun 2022, Dinas Kesehatan Jawa Barat masuk ke dalam **6 besar implementasi reformasi birokrasi (RB) tingkat OPD se-Jawa Barat**

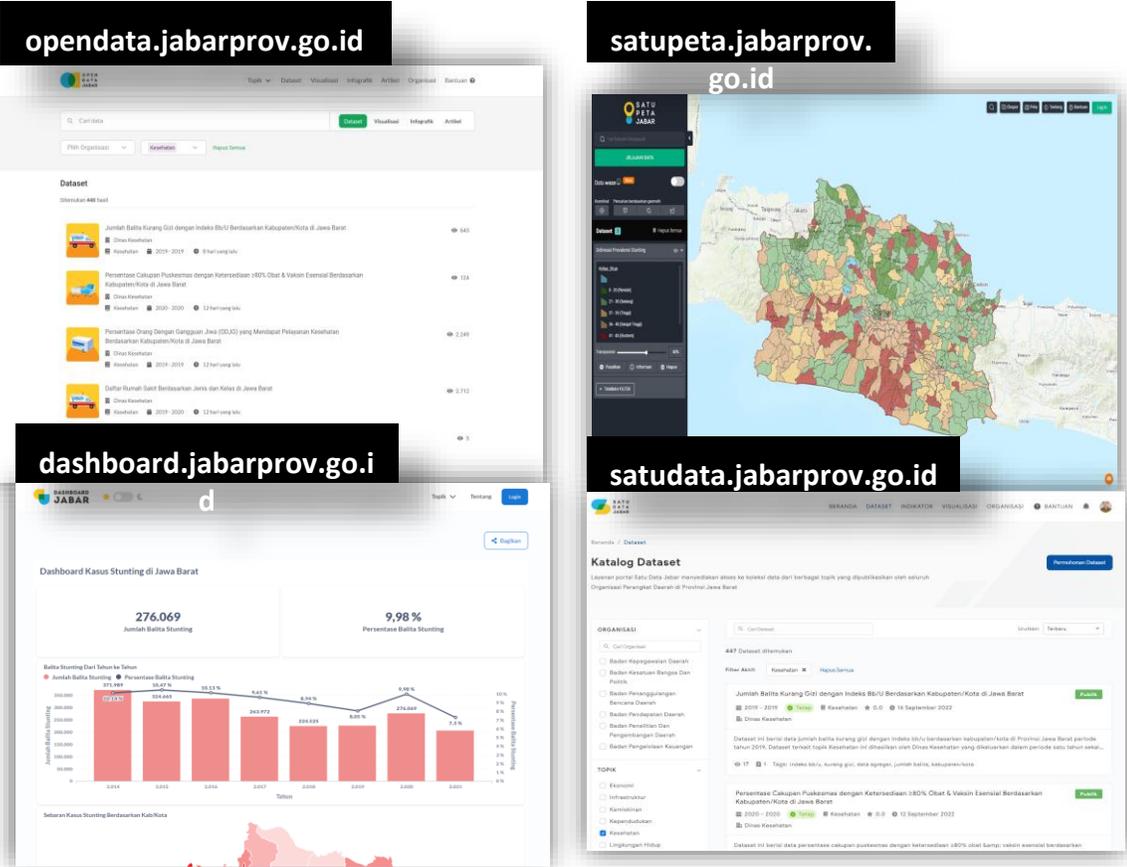
INOVASI YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP KINERJA ORGANISASI

• SADATA DINKES : <https://sadata-diskes.jabarprov.go.id/>

Dalam mendukung pengelolaan data dan informasi kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, maka dibangunlah aplikasi SADATA. Dengan aplikasi sadata maka kegiatan pengumpulan dan validasi data kesehatan dapat dilakukan secara cepat dan akurat



EKOSISTEM DATA JABAR



The collage displays four data portals:

- opendata.jabarprov.go.id**: A portal listing various datasets such as "Jumlah Balita Kurang Gizi dengan Indeks BGI/1 Berdasar Kabupaten/Kota di Jawa Barat".
- satupeta.jabarprov.go.id**: A map-based portal showing geographical data for West Java.
- dashboard.jabarprov.go.id**: A dashboard titled "Dashboard Kasus Stunting di Jawa Barat" showing 276,069 children with stunting and a 9,98% stunting rate. It includes a bar chart for "Balita Stunting Dari Tahun ke Tahun" and a map of "Sebaran Kasus Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota".
- sadata.jabarprov.go.id**: A catalog of datasets for the health department, listing various data points and their update dates.

SIJANTAN JUARA

SiJantan merupakan Sistem Jaminan Kesehatan Juara untuk memberikan informasi, membantu Fasilitasi dan Koordinasi permasalahan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan warga Jawa Barat dan layanan program JKN



BEFORE



AFTER

<https://sites.google.com/view/sijantan-juara>

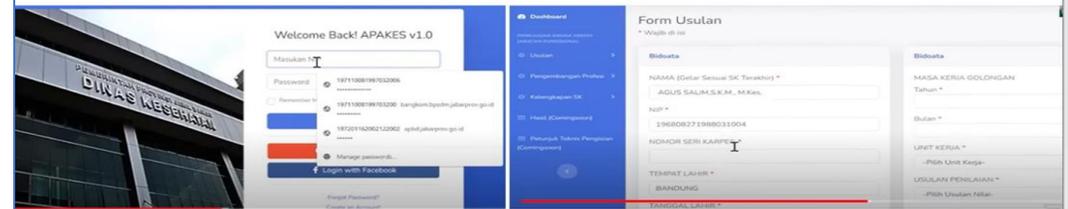
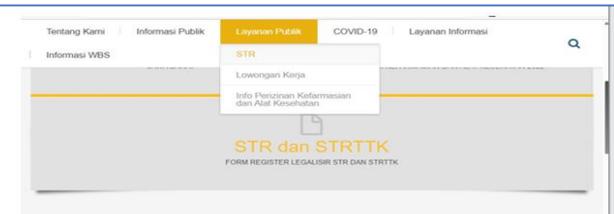
REGISTRASI STR DAN STRTTK PADA APLIKASI APAKES

BEFORE



AFTER

REGISTRASI STR DAN STRTTK PADA WEBSITE DINKES JABAR



INOVASI LUAR BIASA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN SERTA MAMPU BERKONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN KINERJA RS

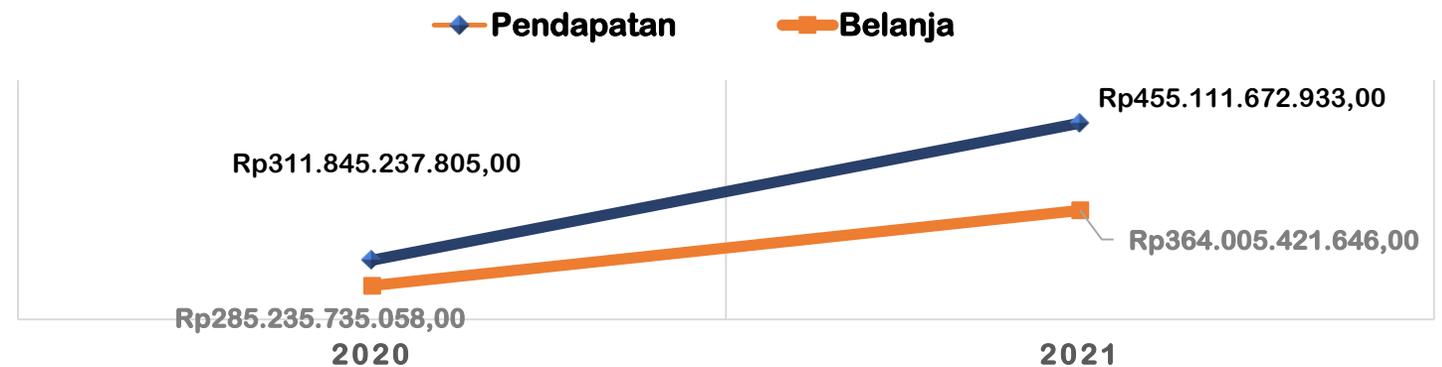


SusTera

(Sustainable Sejahtera)

SEBAGAI INOVASI INDUK

- Rumah Sakit harus dapat menjamin pelayanan kesehatan yang diberikan berkualitas, berdaya saing, tanpa hambatan finansial.
- **Konsep universal** dengan target **kemandirian pendanaan berkelanjutan**, dan kepuasan pelanggan dengan 6 Langkah.
- Tata Kelola Manajemen RS
- Replikasi oleh beberapa rumah sakit
- Buku panduan



INOVASI YANG MEMBERIKAN KEBERMANFAATAN KEPADA MASYARAKAT



BEFORE

MANUAL ANTRI



AFTER

INOVASI KOLALIN COVID 19 (Komunikasi Lalu Lintas Covid)



1.

TELAH DI REPLIKASI DINKES KOTA / KABUPATEN PROVINSI JAWA BARAT



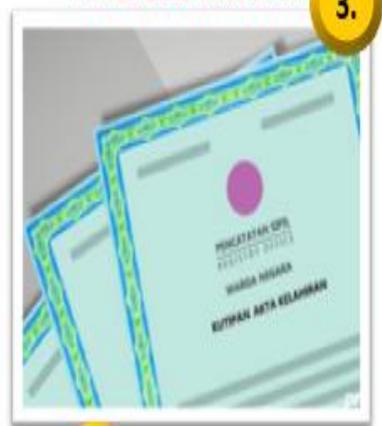
INOVASI APLIKASI E RESEP

Inovasi k-jol (Konsultasi jiwa Online)

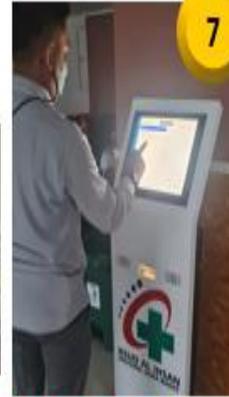


2.

"SI CAKAR SAKTI" SISTEM CETAK KARTU KELUARGA & AKTE KELAHIRAN DI RS



3.



7.

INOVASI KAHONTAL



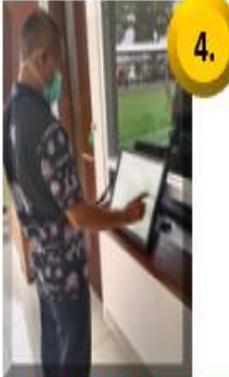
6.

INOVASI BISIK (Bincang Sehat Asyik)



5.

Link: youtube RSUD Al Ihsan



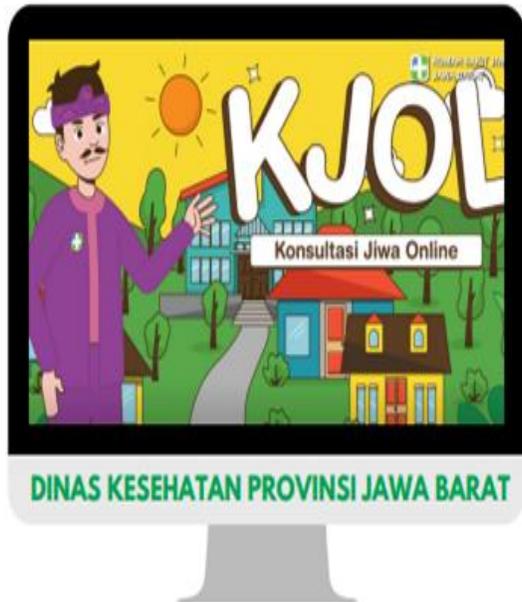
4.

INOVASI IKM



INOVASI YANG MEMBERIKAN KEBERMANFAATAN KEPADA MASYARAKAT

INNOVATION GOVERNMENT AWARD 2022



RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI JAWA BARAT



KEBAHARUAN:

1. Sebagai inisiator dalam pelayanan Kesehatan jiwa kepada masyarakat secara online
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan secara digital
3. Memastikan pelayanan Kesehatan Jiwa disaat adanya pembatasan aktivitas



KEBERMANFAATAN:

1. Memudahkan akses layanan konsultasi Kesehatan mental secara online dengan tenaga kesehatan
2. Mengurangi hambatan bagi masyarakat dalam pencarian pertolongan terhadap masalah Kesehatan mentalnya
3. Menurunkan stigma terhadap masalah Kesehatan jiwa



KEWENANGAN :

1. Perda Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kesehatan Jiwa
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat terkait kebijakan pelayanan KJOL No.445.2/1181/RSJ tahun 2020



REPLIKASI

Pengembangan platform yang lebih mutakhir seperti chatbot, video call untuk pengembangan layanan selanjutnya serta kerjasama sosialisasi program dengan PIKOBAR Jabar

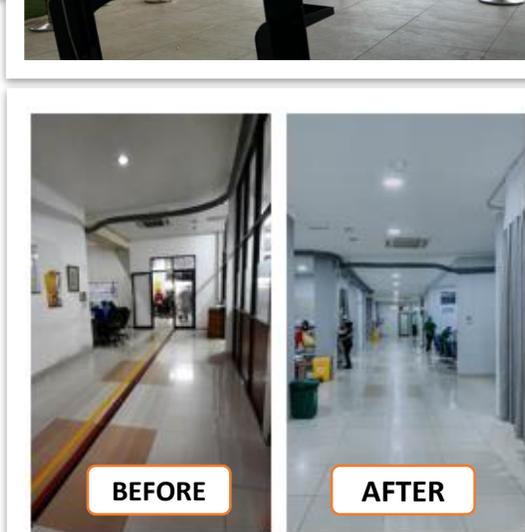
Meningkatkan Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hidup Sehat

BISIK

(Bincang Sehat Asyik Bersama PKRS RSUD Al Ihsan)



IMPLEMENTASI SUSTERA TERHADAP SARANA PELAYANAN (INFRASTRUKTUR / FASILITAS)



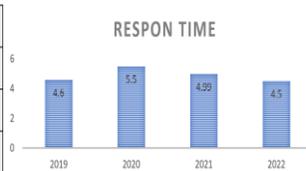
IMPLEMENTASI SUSTERA TERHADAP SARANA PELAYANAN NON ELEKTRONIK

1. INOVASI ZERUK (ZERO RUJUK)

1.



NO	Respon Time	STANDAR	2021	2022	2023
1	Px IGD Triase	5 menit	6	5	5
2	SC Ponok	< 30 Mnt	70	74	45
3	Masuk Rawat	2 jam	5	4	2



2. INOVASI SI MANIS

2.



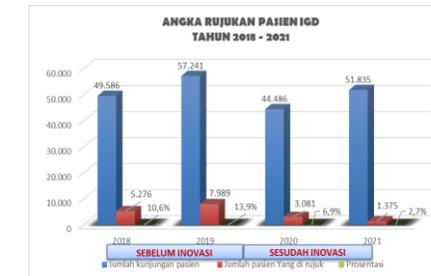
(Sajian Makanan dengan Garnis dan Cita Rasa yang Baik)

3. INOVASI GERCEP

3.

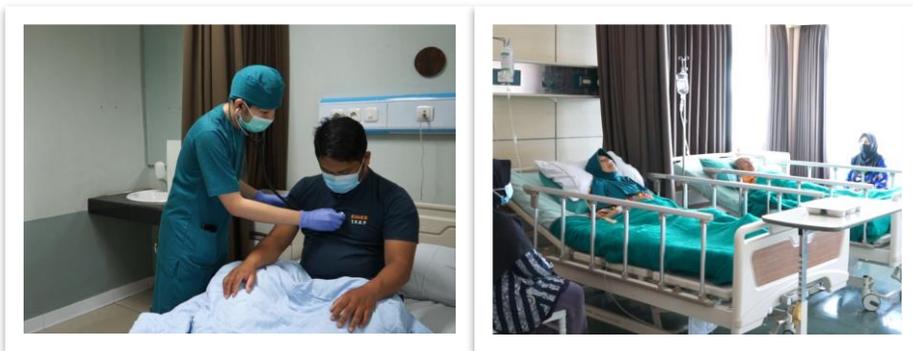


(GERAKAN EMERGENCY RESPON CEPAT & PROFESIONAL)



4. INOVASI CEMAS CEKAL CEPAT MASUK CEPAT KELUAR RAWAT INAP

4.



5. INOVASI KANIS RANAP COVID 19

5.

KATAGORI KLINIS RAWAT INAP COVID 19



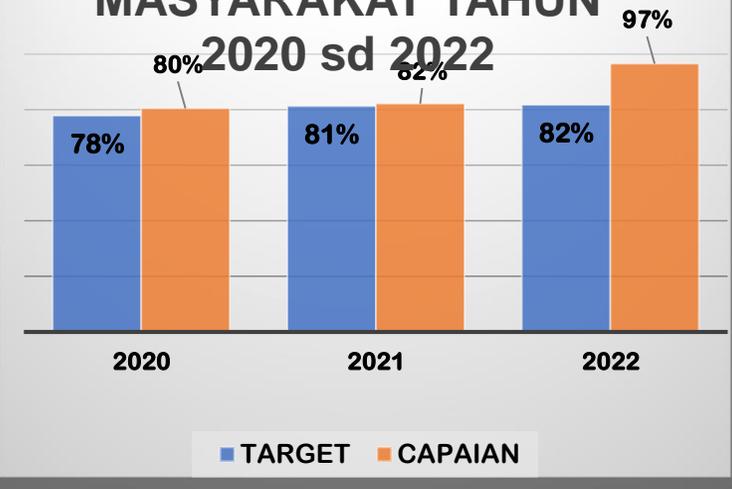
LAYANAN TERINTEGRASI YANG MENGHADIRKAN KEPUASAN & KEBERMANFAATAN BAGI MASYARAKAT

EMPAT PELAYANAN UNGGULAN : JANTUNG, KANKER, URONEFRO & STROKE

TIM MEDIS & PENUNJANG MEDIS TERINTEGRASI



GRAFIK INDEK KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2020 sd 2022



Pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 TW II mencapai 97.01 % dengan peringkat "A"



04

DOKUMNETASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI



PENCANANGAN RB DAN ZI



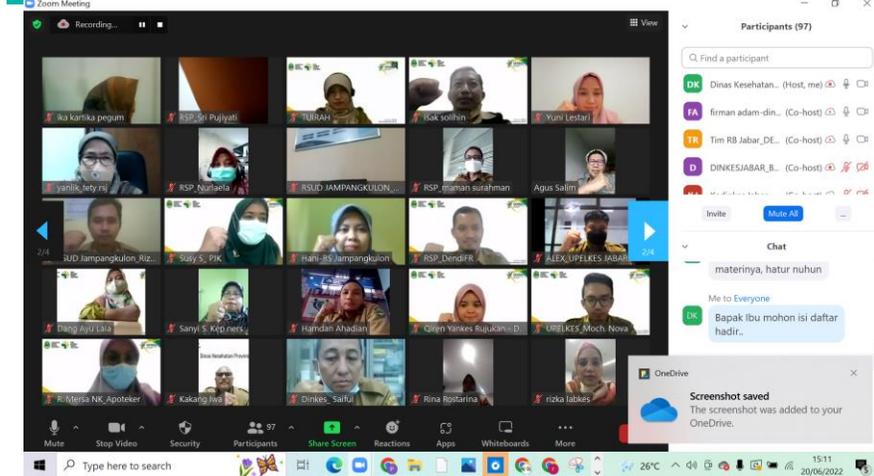
RAPAT PEMBENTUKAN TIM KERJA RB



RAPAT KOORDINASI TIM RB



SURVEY INTERNAL



KOMITMEN ZONA INTEGRITAS MELALUI PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

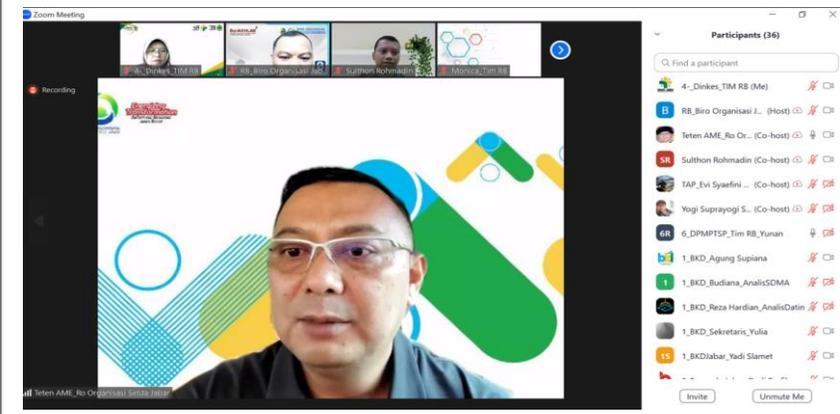
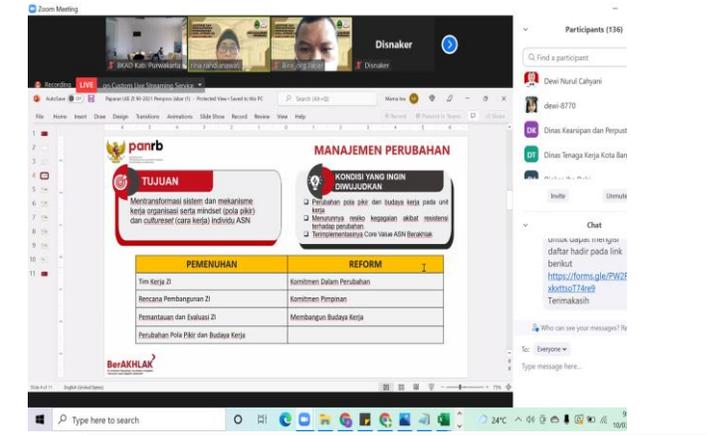




DOKUMENTASI KEGIATAN

PENDAMPINGAN BIRO ORGANISASI

PENDAMPINGAN INSPEKTORAT



4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

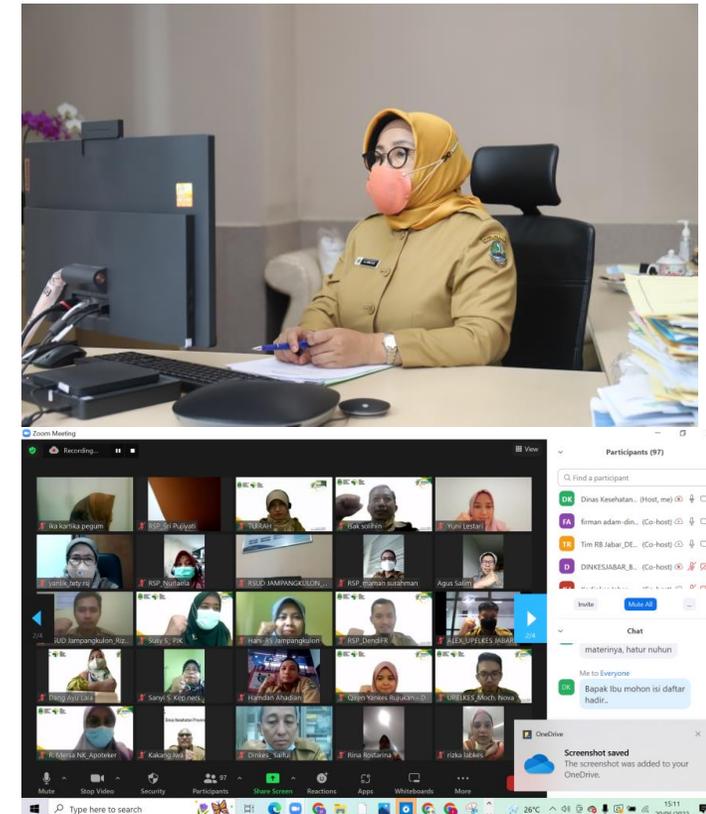


SOSIALISASI DAN INTENALISASI

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI



SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS



PENILAIAN EKTERNAL BIRO ORGANISASI

rbjabarprov.go.id/home

DIKES
@ Online

Menu: Dashboard, INFO, RB Perangkat Daerah, Ajan Pendaratan, SETTING, Profile

PENILAIAN	Bobot	Self Assessment		Hasil Verifikasi	
		Nilai	%	Nilai	%
I. PEMULIHAN	14,00	14,40	99 %	10,58	72 %
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	1,83	92 %	1,77	88 %
2. DOREGULASI KEUANGAN	1,00	1,00	100 %	0,50	50 %
3. PENATAAN DAYA PenguATAN ORGANISASI	2,00	2,00	100 %	1,80	90 %
4. PENATAAN TATAKALSAVA	1,00	1,00	100 %	0,85	85 %
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40	1,40	100 %	1,13	81 %
6. PenguATAN AKUNTABILITAS	2,50	2,50	100 %	1,72	69 %
7. PenguATAN PENGAWASAN	2,20	2,17	99 %	1,42	65 %
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	2,50	100 %	1,39	56 %
II. REFORMASI	21,70	19,94	92 %	13,17	56 %
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00	2,25	75 %	1,54	51 %
2. DOREGULASI KEUANGAN	2,00	2,00	100 %	0,50	25 %
3. PENATAAN DAYA PenguATAN ORGANISASI	1,50	1,50	100 %	1,50	100 %
4. PENATAAN TATAKALSAVA	3,75	3,75	100 %	2,77	74 %
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2,00	1,50	75 %	1,50	75 %
6. PenguATAN AKUNTABILITAS	3,75	3,75	100 %	0,00	0 %
7. PenguATAN PENGAWASAN	1,95	1,95	100 %	1,95	100 %
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75	3,24	86 %	2,41	64 %

KOMPONEN HASIL

INDIKATOR	BOBOT	REKORD
AKUNTABILITAS	3,00	3,00
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	9,12
PEMERINTAH YANG BERPIKIR BERSAMA-SAMA	10,00	9,00
KINERJA ORGANISASI	12,00	12,00
PELAYANAN YANG INDEPENDEN	15,70	1,00

Nilai Self Assessment: **89,58**

Indeks RB Perangkat Daerah: **A**

Nilai Hasil Verifikasi: **61,41**

Indeks RB Perangkat Daerah: **B**



EVALUASI RBZI DI UPTD







**Energizing
Transformasi**
Reformasi Birokrasi
Jawa Barat